



Koordinasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Wisata Bukit Kasih Pada Masa Pandemi Covid-19

Christian R.H. Poli¹
Ventje Kasenda²
Donald K. Monintja³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui koordinasi pemerintah dalam pengelolaan Wisata Bukit Kasih Pada Masa Pandemi Covid-19. Destinasi wisata salah satu sektor yang mempunyai sumber penerimaan negara. Tidak hanya itu, sektor pariwisata suatu kegiatan ekonomi memiliki mata rantai yang sangat panjang. Keberadaan sektor pariwisata dapat memberi manfaat positif bagi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang ikut terlibat dalam memanfaatkan peluang usaha di objek wisata, oleh sebab itu pengelolaan yang baik diikuti dengan koordinasi antar lembaga yang baik akan meningkatkan jumlah pengunjung dan pendapatan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara pada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemic covid-19 terus dilaksanakan dengan baik, dan koordinasi ini dilakukan mulai dari Dinas Pariwisata Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan juga para pelaku usaha yang ada di wisata Bukit Kasih ini. Sejauh ini dapat dikatakan koordinasi dari pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19 itu lebih ke penerapan protokol kesehatan yang harus diberlakukan pada masa covid-19,

Kata Kunci : Koordinasi, Pemnerintah, Pariwisata, Pandemi Covid 19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Potensi peluang pariwisata juga mampu menunjang sektor ini menjadi bagian dari pembangunan yang memiliki nilai dan posisi strategis yang memberi multi pengaruh baik secara langsung maupun tidak kepada suatu daerah. Selain mampu memberi nilai ekonomi dan nilai komersial yang besar, pada dasarnya sektor pariwisata juga mempunyai potensi lain bersifat sosial seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas nilai sosial budaya, integritas dan jatidiri, perluasan wawasan, konservasi alam dan peningkatan mutu lingkungan.

Industri masyarakat suatu daerah merupakan unsur penunjang bagi wisatawan sebagai konsumsi dari dampak kunjungan mereka ke destinasi pariwisata. Usaha dari industri jasa tersebut terdiri dari berbagai item yang bersifat habis seperti makanan, cenderamata (kerajinan tangan, tenun, dan sebagainya) Barang-barang souvenir yang dominan dihasilkan dari kreativitas ini, berdampak ganda bagi kedua belah pihak yakni masyarakat dan wisatawan. Disinilah arti pentingnya kemampuan menangkap peluang dari kemajuan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki kekayaan budaya yang unik, keindahan alam dan keramahan penduduk yang merupakan aset negara yang sangat potensial untuk terus dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan masyarakat berupaya mengembangkan objek pariwisata yang ada di Sulawesi Utara khususnya pariwisata yang ada di

desa Kanonang kecamatan Kawangkoan Barat.

Di era globalisasi di mana persaingan semakin tinggi, manusia semakin membutuhkan rekreasi untuk mengimbangi rutinitasnya. Di sisi lain, lahan dan obyek wisata alam semakin berkurang dengan semakin banyak areal yang di buka untuk pemukiman serta industri. Bukit Kasih Kanonang berada di kaki Gunung Soputan merupakan salah satu obyek wisata alam yang terdapat di Sulawesi Utara. Obyek dan daya tarik wisata Bukit Kasih termasuk pemandangan alam yang indah, udara yang segar, air belerang panas alami, wisata kuliner, wisata rohani, dan wisata budaya yang mempersatukan keberagaman daerah secara harmonis.

Keberadaan objek wisata Bukit Kasih yang ada di Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kawasan objek wisata tersebut. Bukit Kasih merupakan salah satu objek wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi wisata yang unggul dan strategis. Sebagian penduduk Desa Kanonang membuka usaha di Kawasan objek wisata Bukit Kasih.

Adapun jenis usaha yang ada di kawasan wisata Bukit Kasih yaitu : rumah makan, tukang foto, tukang pijat, penjual aksesoris. Keberadaan Objek Wisata Bukit Kasih yang telah memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian mengenai dampak Objek Wisata Bukit Kasih di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat. Namun sampai saat ini yang menjadi permasalahan pada objek wisata bukit

kasih yaitu masalah sampah dan toilet yang kurang, sehingga mengakibatkan para pengunjung tidak lagi nyaman, dari pemerintah sendiri ternyata sudah menganggarkan tinggal menunggu pelaksanaan. Karena jika destinasi wisata Bukit Kasih Kanonang tidak terawat maka pengunjung akan kurang dan nantinya akan berdampak pada ekonomi masyarakat yang membuka usaha di destinasi wisata Bukit Kasih Kanonang.

Adapun tabel kunjungan wisatawan di destinasi wisata Bukit Kasih Kanonang pada tahun 2017-2019, sebagai berikut :

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara
2017	87.976 Pengunjung	1.698.523 Pengunjung
2018	127.879 Pengunjung	1.958.899 Pengunjung
2019	153.656 Pengunjung	2.200.000 Pengunjung

Meningkatkannya para wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Bukit Kasih Kanonang tentunya pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini bisa dilihat dengan masyarakat yang membuka usaha di sekitar destinasi wisata Bukit Kasih Kanonang, tentunya hal ini membuat masyarakat yang ada menjadi senang dan tentunya hal ini mencegah terjadi tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat, karena masyarakat sudah di sibukkan dengan mengelola destinasi wisata yang ada di Bukit Kasih Kanonang

Konsep Koordinasi

Koordinasi menurut Hasibuan (2013:46) , terdapat tipe koordinasi yaitu :

Koordinasi vertikal (vertical coordination) adalah kegiatan-

kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya atasan mengkoordinasikan semua anggota yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

Menurut Pearce II dan Robinson yang dimaksud dengan koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama (Silalahi, 2013). Sedangkan menurut Stoner (dalam Sugandha, 2011:212), koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa koordinasi merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan bersama yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut. Sedangkan Brech, memberikan pengertian koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2011).

Pengertian Pariwisata

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan

daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, dan pantai.
3. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, dan informasi pariwisata). Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Menurut Prof. Hunziker dan Prof. K. Krapf dalam Muhammad Ilyas (2009), pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama menangkap dari menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti dalam rangka untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dengan

mempertimbangkan data di atas dan membatasi penelitian maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Kecamatan Kawangkoan Barat khususnya di destinasi Wisata Bukit Kasih Kanonang.

Informan adalah orang yang dipakai dalam penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi mengenai fokus penelitian ini.

Informan yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa
2. Pemerintah Kecamatan Kawangkoan Barat
3. Pemerintah Desa Kanonang Dua.
4. Pelaku Usaha di Destinasi Wisata Bukit Kasih Kanonang (2 Orang)

Pembahasan

Informan 1 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara ditanyakan mengenai bagaimana koordinasi pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19 ? *"Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal kalau Bukit Kasih berlokasi di Kabupaten Minahasa tepatnya di Desa Kanonang, dalam hal ini Dinas Pariwisata langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa yang ada dan juga koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa, jadi misalnya ada surat himbauan dari pemerintah Provinsi, dalam hal ini himbauan untuk penutupan tempat wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara salah satunya bukit kasih Kanonang. Kalau dari koordinasi dari pemerintah dengan para pelaku usaha terkait penutupan atau pembatasan*

objek wisata Bukit Kasih Kanonang, sejauh ini tidak ada masalah, karena pemerintah juga menyesuaikan dengan kondisi Kabupaten Minahasa yang sempat menjadi zona merah pada masa covid-19, jadi dalam hal ini juga tentunya masyarakat dan juga para pelaku usaha bisa memaklumi apa yang telah ditentukan oleh pemerintah yang ada. Jadi pada beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan kegiatan dengan tujuannya untuk mensosialisasikan pada warga dan para pelaku usaha tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan ditengah pandemic dalam pengelolaan wisata bukit kasih Kanonang ini. Jadi kalau dari pemerintah sendiri ketika menutup tempat wisata ini tentunya dari pemerintah sendiri tidak diam, namun pada penutupan wisata Bukit Kasih Kanonang ini di masa covid-19 tentunya pemerintah juga melakukan renovasi dan lebih memberdayakan objek wisata Bukit Kasih Kanonang ini. Contohnya renovasi akses jalan, lampu jalan dan juga fasilitas toilet yang ada. Sebelum dan sementara pandemi tentunya dalam koordinasi yang dilakukan dari Dinas Pariwisata dan juga pihak terkait yang mengelolah wisata bukit kasih Kanonang dapat dikatakan sama saja ya, namun memang keadaan dilapangan agak berbeda juga”.

Informan 2 Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa ditanyakan mengenai bagaimana koordinasi pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19 ? “ Koordinasi pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pihak pemerintah mulai dari desa, Kecamatan, Kabupaten dan juga Provinsi dalam pengelolaan

wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19 selalu menjalin komunikasi yang baik, terlebih khusus dalam pengelolaan wisata bukit kasih ini. Kalau dari koordinasi dari pemerintah dengan para pelaku usaha terkait penutupan atau pembatasan objek wisata Bukit Kasih Kanonang, sejauh ini tidak ada masalah, karena pemerintah juga menyesuaikan dengan kondisi Kabupaten Minahasa yang sempat menjadi zona merah pada masa covid-19, jadi dalam hal ini juga tentunya masyarakat dan juga para pelaku usaha bisa memaklumi apa yang telah ditentukan oleh pemerintah yang ada. Jadi pada beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan kegiatan dengan tujuannya untuk mensosialisasikan pada warga dan para pelaku usaha tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan ditengah pandemic dalam pengelolaan wisata bukit kasih Kanonang ini. Jadi kalau dari pemerintah sendiri ketika menutup tempat wisata ini tentunya dari pemerintah sendiri tidak diam, namun pada penutupan wisata Bukit Kasih Kanonang ini di masa covid-19 tentunya pemerintah juga melakukan renovasi dan lebih memberdayakan objek wisata Bukit Kasih Kanonang ini. Contohnya renovasi akses jalan, lampu jalan dan juga fasilitas toilet yang ada. Sebelum dan sementara pandemi tentunya dalam koordinasi yang dilakukan dari Dinas Pariwisata dan juga pihak terkait yang mengelolah wisata bukit kasih Kanonang dapat dikatakan sama saja ya, namun memang keadaan dilapangan agak berbeda juga”.

Informan 3 Pemerintah Kecamatan Kawangkoan Barat ditanyakan mengenai bagaimana koordinasi pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada

masa pandemi covid-19 ? *“Koordinasi dari pemerintah Kecamatan dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19 dapat dilihat dari komunikasi yang berjalan baik antara pemerintah dan juga pihak terkait dalam proses pengelolaan wisata bukit kasih ini. Tentunya ketika melihat wisata bukit kasih ditengah pandemic, dapat dikatakan bahwa ada banyak masyarakat khususnya yang mencari nafkah disana mengalami penurunan dari segi pendapatan mereka, karena kita ketahui bersama bahwa dari pemerintah sendiri membatasi dan juga menutup sementara tempat wisata ini dikarenakan untuk bisa mengontrol aktivitas masyarakat ditengah pandemi covid-19. Namun dalam hal ini juga pihak pemerintah menyarankan bagi para pelaku usaha untuk tetap berinovasi dalam proses pengelolaan wisata bukit kasih Kanonang ini. Namun dalam hal ini juga pemerintah tidak lepas untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait dalam proses menunjang pengelolaan wisata bukit kasih Kanonang, karena pemerintah menilai bahwa koordinasi dari pemerintah yang ada dan juga semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata bukit kasih Kanonang ini dapat bisa memberikan solusi bagi masyarakat yang mengadu nasib disana, maka dari itu memang koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam proses pengelolaan wisata bukit kasih ini selalu berjalan dengan baik, dan tentunya sesuai arahan dari atasan pemerintah dalam hal pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19”.*

Informan 4 Pemerintah Desa Kanonang Dua ditanyakan mengenai bagaimana koordinasi pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih

pada masa pandemi covid-19 ? *“Pada dasarnya kami dari pemerintah Desa mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat, terkait penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang tentunya dapat dikatakan bahwa salah salah dampak dari penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yaitu tempat wisata yang ada, yang dimana salah satu tempat wisata juga yang terdampak adalah bukit kasih Kanonang. Tentunya dalam pengelolaan wisata bukit kasih Kanonang ditengah pandemi covid-19, adalah menghasilkan beberapa kebijakan dari pemerintah yang ada, kemudian hasil kebijakan tersebut kami sampaikan pada masyarakat khususnya yang memiliki usaha di tempat wisata bukit kasih Kanonang. Kami juga memberikan sosialisasi pada masyarakat bahwa karena bukit kasih ditutup maka masyarakat yang melakukan usaha ditempat wisata tersebut agar jangan hanya bergantung pada usaha tersebut, karena dari pemerintah desa sendiri juga menyampaikan bahwa tidak tahu juga wisata bukit kasih ini akan ditutup, kemudian sejak covid-19 ada ini memang terjadi penurunan pendapatan bagi para pelaku usaha yang ada, dan dapat dikatakan adanya penurunan pendapatan bagi para masyarakat yang ada. Jadi tentunya dalam hal ini pihak pemerintah juga memberikan edukasi bagi masyarakat yang mendirikan usaha disana untuk dapat mencari pekerjaan lain dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka di masa pandemi covid-19. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa memang dari koordinasi mulai dari pemerintah desa, pemerintah Kecamatan, pemerintah Kabupaten sampai pada pemerintah Provinsi dalam pengelolaan bukit kasih Kanonang ini*

tentunya dapat dikatakan sudah baik dan terus berkomunikasi mengenai pengelolaan wisata bukit kasih yang ada di Desa Kanonang Dua Kabupaten Minahasa ini”.

Informan 5 Pelaku Usaha di Destinasi Wisata Bukit Kasih Kanonang ditanyakan mengenai bagaimana koordinasi pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19 ? *“Koordinasi pengelolaan wisata bukit kasih Kanonang ini tentunya langsung dengan pemerintah yang ada, dalam hal Dinas Pariwisata, namun sebelumnya itu dalam pengelolaan wisata bukit kasih ini hanya dikelola oleh badan pengelola saja, dan dalam proses pengelolaan ini ditangani oleh pemerintah dalam hal ini kepala destinasi dan tatakelola. Garis koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga kami para pelaku usaha dapat dikatakan sudah baik ya, apalagi ditengah pandemic seperti ini para pelaku usaha juga memang harus berkoordinasi terus dengan pihak pemerintah. Maka dari itu dapat dikatakan koordinasi para pelaku usaha dengan pemerintah terus berjalan dalam pengelolaan wisata bukit kasih ini walaupun memang ditengah pandemi covid-19”.*

Informan 6 Pelaku Usaha di Destinasi Wisata Bukit Kasih Kanonang ditanyakan mengenai bagaimana koordinasi pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19 ? *“ Koordinasi pemerintah dengan kami para pelaku usaha yang ada di bukit kasih ini dimasa covid-19, tentunya dapat dikatakan selalu berjalan dengan baik ya, karena ditengah pandemic seperti ini pemerintah terus mendorong kepada kami agar tetap menjalankan protokol kesehatan*

terutama didalam lingkungan wisata bukit kasih ini, namun tentunya dapat dikatakan koordinasi dari pemerintah ini juga membuat kami para pelaku usaha agak kesulitan dalam proses mendapatkan pendapatan, karena memang beberapa waktu lalu bukit kasih ini ditutup dan juga para pengunjung yang datang memang berkurang, namun dari pemerintah sendiri terus mengedukasikan pada kami untuk mencari jalan lain dalam hal pemenuhan kebutuhan, tentunya jangan hanya mengharapkan penghasilan dari usaha yang ada di bukit kasih, namun tetap berinovasi atau mencari penghasilan ditempat lain, sembari menunggu wisata bukit kasih ini normal kembali”.

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti akan membahas penelitian yang berjudul “Koodinasi Pemerintah dalam Pengelolaan Wisata Bukit Kasih Pada Masa Pandemi Covid-19” dengan menggunakan teori Menurut Hasibuan (2013:46), terdapat dua tipe koordinasi yaitu :

1. Koordinasi vertikal (vertical coordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya atasan mengkoordinasikan semua anggota yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Pada indikator ini peneliti akan membahas mengenai koordinasi yang dilakukan dari pemerintah Provinsi dalam hal ini dinas terkait

yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dengan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata bukit kasih di masa pandemi covid-19. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara pada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemic covid-19 terus dilaksanakan dengan baik, dan koordinasi ini dilakukan mulai dari Dinas Pariwisata Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan juga para pelaku usaha yang ada di wisata Bukit Kasih ini. Sejauh ini dapat dikatakan koordinasi dari pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19 itu lebih ke penerapan protokol kesehatan yang harus diberlakukan pada masa covid-19, dan hal ini diwajibkan untuk para pelaku usaha dan juga para pengunjung yang datang kesana. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah juga dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemic covid-19, dapat dilihat juga dari penutupan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada, memang kita ketahui bersama bahwa penutupan tempat wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang salah satunya adalah wisata bukit kasih ini mendapatkan banyak penolakan dari para pelaku usaha yang ada, namun dari Pemerintah sendiri terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten, Kecamatan sampai ke desa, agar dapat mengikuti himbuan dari pemerintah ini. Maka dapat dikatakan bahwa koordinasi dari

pemerintah dan juga semua pihak yang terkait dalam pengelolaan wisata bukit kasih ini selalu berjalan dengan baik, dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa koordinasi pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih ini selalu berkoordinasi dengan para pekerja yang ada disana, yang dimana walaupun ditengah pandemi covid-19, pemerintah tetap memberikan arahan untuk para pekerja disana agar tetap menjaga kebersihan yang ada di tempat wisata bukit kasih ini, bahkan ditengah pandemic covid-19, pemerintah juga tetap melakukan renovasi dan juga pembangunan pada akses menuju kedalam bukit kasih ini. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa koordinasi dari pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih ini terus berjalan dengan baik, walaupun ditengah pandemic covid-19. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal kalau Bukit Kasih berlokasi di Kabupaten Minahasa tepatnya di Desa Kanonang, dalam hal ini Dinas Pariwisata langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa yang ada dan juga koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa, jadi misalnya ada surat himbuan dari pemerintah Provinsi, dalam hal ini himbuan untuk penutupan tempat wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara salah satunya bukit kasih Kanonang. Kalau dari koordinasi dari pemerintah dengan para pelaku usaha terkait penutupan atau pembatasan objek wisata Bukit Kasih Kanonang, sejauh ini tidak ada masalah,

karena pemerintah juga menyesuaikan dengan kondisi Kabupaten Minahasa yang sempat menjadi zona merah pada masa covid-19, jadi dalam hal ini juga tentunya masyarakat dan juga para pelaku usaha bisa memaklumi apa yang telah ditentukan oleh pemerintah yang ada. Jadi pada beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan kegiatan dengan tujuannya untuk mensosialisasikan pada warga dan para pelaku usaha tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan ditengah pandemic dalam pengelolaan wisata bukit kasih Kanonang ini. Jadi kalau dari pemerintah sendiri ketika menutup tempat wisata ini tentunya dari pemerintah sendiri tidak diam, namun pada penutupan wisata Bukit Kasih Kanonang ini di masa covid-19 tentunya pemerintah juga melakukan renovasi dan lebih memberdayakan objek wisata Bukit Kasih Kanonang ini. Contohnya renovasi akses jalan, lampu jalan dan juga fasilitas toilet yang ada. Sebelum dan sementara pandemi tentunya dalam koordinasi yang dilakukan dari Dinas Pariwisata dan juga pihak terkait yang mengelolah wisata bukit kasih Kanonang dapat dikatakan sama saja ya, namun memang keadaan dilapangan agak berbeda juga.

Penutup

Kesimpulan

Dalam proses pemberdayaan Koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara pada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemic covid-19 terus dilaksanakan dengan baik, dan koordinasi ini

dilakukan mulai dari Dinas Pariwisata Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan juga para pelaku usaha yang ada di wisata Bukit Kasih ini. Sejauh ini dapat dikatakan koordinasi dari pemerintah dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19 itu lebih ke penerapan protokol kesehatan yang harus diberlakukan pada masa covid-19, dan hal ini diwajibkan untuk para pelaku usaha dan juga para pengunjung yang datang kesana. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah juga dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemic covid-19

Saran

Disarankan juga untuk pemerintah dalam melakukan koordinasi terkait pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemi covid-19, harus adanya evaluasi dilapangan yang dilakukan secara terperinci, karena dalam hal ini ditemukan dilapangan bahwa dalam pengelolaan wisata bukit kasih pada masa pandemic sangat berdampak pada pelaku usaha yang ada di sana, karena dari pemerintah sendiri tidak memberikan solusi yang tepat untuk para pelaku usaha yang kehilangan mata pencarian mereka pada masa pandemic covid-19. Karena kita ketahui bersama bahwa pada masa pandemi covid-19 para pelaku usaha yang ada di wisata bukit kasih ini tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka, memang tidak semua para pelaku usaha yang terdampak, namun keadaan dilapangan menunjukkan para pelaku usaha yang terdampak akibat covid-19, sangat susah dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka.

Daftar Pustaka

- A Hari Karyono. 1997. Kepariwisata. Jakarta: Grasindo.
- A Yoeti, Oka. (2014). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung. Angkasa.
- Andarmoyo, Sulisty. 2012. Konsep Teori, Proses dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aji Supriyanto (2005:238), Pengertian Sistem, Ekosiana. Yogyakarta.
- Burn, P dan Holder, A. 1997. "Pariwisata: Perspektif Baru" Prestice Hall Hampstead Internasional.
- Gusti Bagus Rai Utama. 2016. Pengantar Industri Pariwisata. Yogyakarta: Depublish.
- Ilyas, Muhammad. 2009. Strategi Pengembangan Pariwisata Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una. Tesis. Makassar: Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Inu Kencana Syafie. 2007. Etika Pemerintahan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kasenda Ventje. 2018. Eksistensi Lembaga Adat dalam Pembangunan Kecamatan. Jurnal Eksekutif Fispol Unsrat Manado.
- Mardiasmo, 2003. Akuntansi Sektor Publik (edisi kedua). Yogyakarta : Andi.
- Monintja Donald, 2019. Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pulisan. Jurnal eksekutif Fispol Unsrat.
- Pangemanan Fanley, 2021. Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Governance. Fispol Unsrat Manado.
- Unga, Kartini La Ode, I Made Benyamin dan Roland Alexander Barkey. Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda. Skripsi Universitas Hasanudin. Makasar.
- S.P,Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soekadijo, R. G, 2000. Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata sebagai Systemic Linkage. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Spillane, James. 1994. Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Keбудayaan. Kanisius. Yogyakarta.
- Subadra, I Nengah. (2006). Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan : Studi Kasus di Mangrove Information Center, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Tesis, Kajian Pariwisata : Universitas Udayana.
- Yaman A, dan Mohd, Abdullah. 2004. Ekowisata Berbasis Komunitas: Baru Proposisi untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Lingkungan di Malaysia". Jurnal Ilmu Terapan.